

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan secara rinci yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan

Gambaran Keuangan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan proyeksi kerangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam horizon waktu perencanaan jangka menengah daerah dengan pertimbangan utama kondisi kinerja keuangan daerah yang telah dihasilkan selama ini, baik itu aspek realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun analisis terhadap perkembangan neraca daerah.

Selanjutnya kerangka pendanaan merupakan pedoman bagi daerah dalam menskenariokan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam APBD selama lima tahun kedepan. Pada sisi pendapatan akan terlihat sejauh mana faktor internal dan eksternal akan mempengaruhi pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), maupun dana yang berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat berupa ; DAU, DAK, bagi hasil serta dana otonomi khusus Papua. Sedangkan dari sisi belanja daerah akan diproyeksikan kebutuhan belanja daerah untuk memenuhi berbagai kriteria belanja wajib dan mengikat, belanja prioritas daerah dan belanja non prioritas. Sedangkan dari sisi pembiayaan akan terlihat bauran strategi kebijakan penyeimbangan antara pendapatan dan belanja daerah yang terwujud dalam surplus/defisit anggaran daerah.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, pada akhirnya manajemen komponen APBD berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah terutama dalam mencermati adanya hubungan yang terukur secara rasional antara ketiganya. Hal ini penting untuk menjaga

terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013-2017

Analisis kinerja keuangan masa lalu mendeskripsikan tentang analisis kinerja keuangan daerah pada periode tahun 2013-2017, berupa kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu akan diketahui pola perkembangan pendapatan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

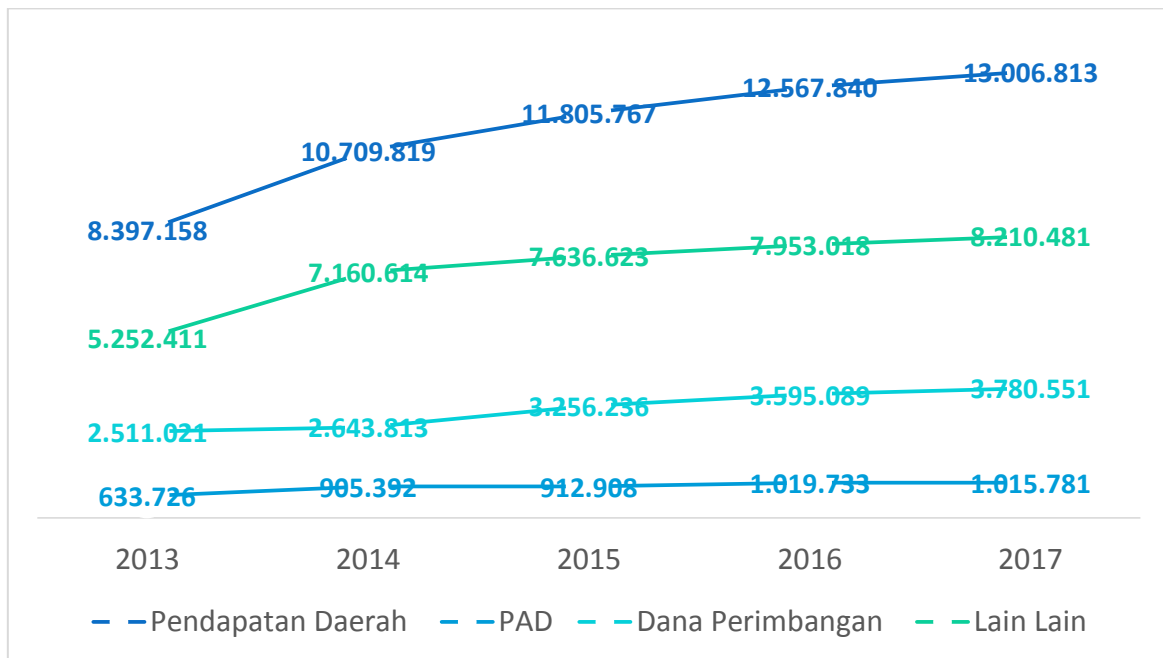
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Keberadaan pendapatan daerah akan memberikan kemampuan fiskal pada daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Pendapatan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Dana Perimbangan, yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Gambar Grafik 3.1 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Secara umum, realisasi

pendapatan daerah Provinsi Papua mengalami perkembangan yang konsisten dan terus menanjak sepanjang periode ini, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai sebesar 12 persen, dari sebesar Rp 8,39 trilyun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.10,70 trilyun pada tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 11,80 trilyun pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp 12,56 trilyun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 13,00 trilyun.

Gambar 3.1. Garfik Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017



Sumber Data : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013– 2017

Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan, maka terlihat adanya perbedaan pola pertumbuhan sesuai dengan pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selama periode tahun 2013-2017, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, dari sebesar Rp 512,03 milyar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 927,2 milyar pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 882,2 milyar dan 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1,16 trilyun dan sebesar Rp 1,36 trilyun pada tahun 2017. Sepanjang tahun 2013-2017, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14 persen per tahun.

Selanjutnya pos dana perimbangan secara konsisten mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan yang cukup bervariasi setiap tahunnya, dari sebesar Rp 2,50 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 2,75 triliun pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan cukup besar menjadi Rp 3,45 triliun pada tahun 2015 dan sebesar Rp 3,94 triliun pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, dana perimbangan kembali mengalami peningkatan cukup besar menjadi Rp 4,54 triliun. Sepanjang tahun 2013-2017, pos dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 11 persen per tahun.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terutama disumbangkan oleh dana otonomi khusus Papua dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka OTSUS juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp 4,35 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 4,77 triliun pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp 4,94 triliun pada tahun 2015. Peningkatan terjadi pada tahun 2016 dan 2017 menjadi Rp 5,399 triliun dan Rp 5,58 triliun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13 persen per tahun.

Tabel 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta)

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
PENDAPATAN	8.298.239	8.397.158	101,2	10.802.461	10.709.819	99,1	11.987.596	11.805.767	98,5	13.065.980	12.567.840	96,2	14.116.823	13.006.813	92,1
Pendapatan Asli Daerah	512.034	633.726	123,8	927.254	905.392	97,6	882.299	912.908	103,5	1.161.422	1.019.733	87,8	1.367.161	1.015.781	74,3
Pendapatan Pajak Daerah	413.950	453.677	109,6	592.820	566.063	95,5	659.442	633.392	96,0	879.024	666.992	75,9	1.045.479	756.689	72,4
Hasil Retribusi Daerah	17.639	24.524	139,0	53.865	57.092	106,0	59.670	49.085	82,3	83.188	58.077	69,8	82.930	77.988	94,0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.493	25.793	101,2	32.917	32.942	100,1	15.899	15.932	100,2	52.810	53.759	101,8	52.810	721	1,4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.952	129.732	236,1	247.651	249.295	100,7	147.288	214.498	145,6	146.399	240.905	164,6	185.942	180.383	97,0
Dana Perimbangan	2.506.984	2.511.021	100,2	2.753.097	2.643.813	96,0	3.457.230	3.256.236	94,2	3.949.272	3.595.089	91,0	4.543.835	3.780.551	83,2
Bagi Hasil Pajak	314.281	308.441	98,1	313.663	244.217	77,9	288.080	196.894	68,3	310.889	277.042	89,1	309.397	257.824	83,3
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	169.538	179.414	105,8	327.725	287.888	87,8	430.914	321.105	74,5	610.502	487.428	79,8	296.766	155.189	52,3
Dana Alokasi Umum	1.889.268	1.889.268	100,0	1.991.202	1.991.202	100,0	2.277.933	2.277.933	100,0	2.502.449	2.502.449	100,0	2.570.118	2.338.201	91,0
Dana Alokasi Khusus	133.897	133.897	100,0	120.506	120.506	100,0	460.304	460.304	100,0	514.750	317.778	61,7	1.367.553	1.029.338	75,3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.279.221	5.252.411	99,5	7.122.111	7.160.614	100,5	7.648.066	7.636.623	99,9	7.955.286	7.953.018	100,0	8.205.827	8.210.481	100,1
Dana Penyesuaian	351.842	325.033	92,4	345.040	343.560	99,6	457.146	445.645	97,5	560.235	560.235	100,0	0	0	0,0
Dana Otonomi khusus	4.355.950	4.355.950	100,0	4.777.071	4.777.071	100,0	4.940.430	4.940.430	100,0	5.395.052	5.395.052	100,0	5.580.152	5.580.152	100,0
Dana Tambahan Infrastruktur	571.429	571.429	100,0	2.000.000	2.000.000	100,0	2.250.000	2.250.000	100,0	1.987.500	1.987.500	100,0	2.625.000	2.625.000	100,0
Pendapatan Lainnya	0	0	0,0	0	39.538	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	4.591	0,0

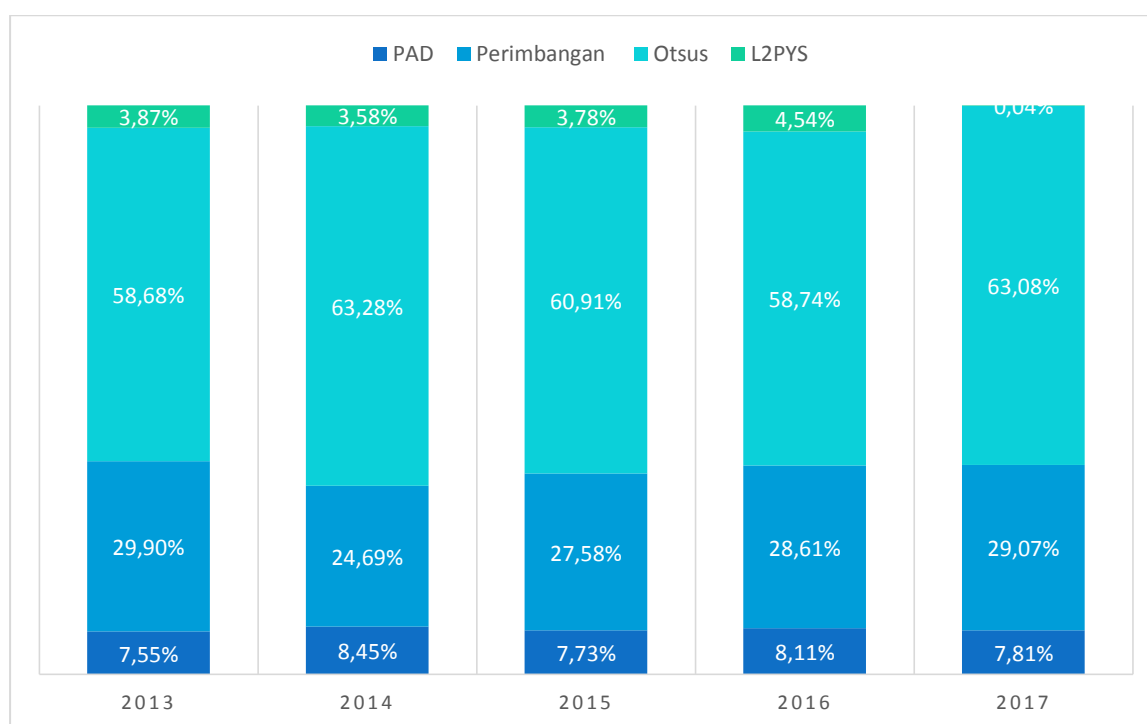
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013– 2017

Keterangan

A= Anggaran dan R = Realisasi

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Provinsi Papua dapat dikatakan sangat berbeda dengan kebanyakan daerah lain di Indonesia yang umumnya didominasi oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun dana perimbangan. Sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, pendapatan daerah Provinsi Papua didominasi oleh besarnya kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dalam hal ini bersumber dari dana otonomi khusus Papua yang dihitung sebesar 2 persen dari DAU nasional serta dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua.

Gambar 3.2 Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2013-2017



Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013 – 2017 (diolah)

Gambar 3.2 menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017. Pada periode tersebut terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah hanya berkisar pada angka 7,50% sampai dengan 8,45 %, kemudian Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan SDA serta DAU dan DAK memberikan kontribusi dalam kisaran angka 24,6% sampai dengan 29,90%. Sedangkan dana otonomi khusus dan

dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus memberikan kontribusi yang dominan melebihi separo dari APBD yang mencapai kisaran angka 58% sampai dengan 63 %.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

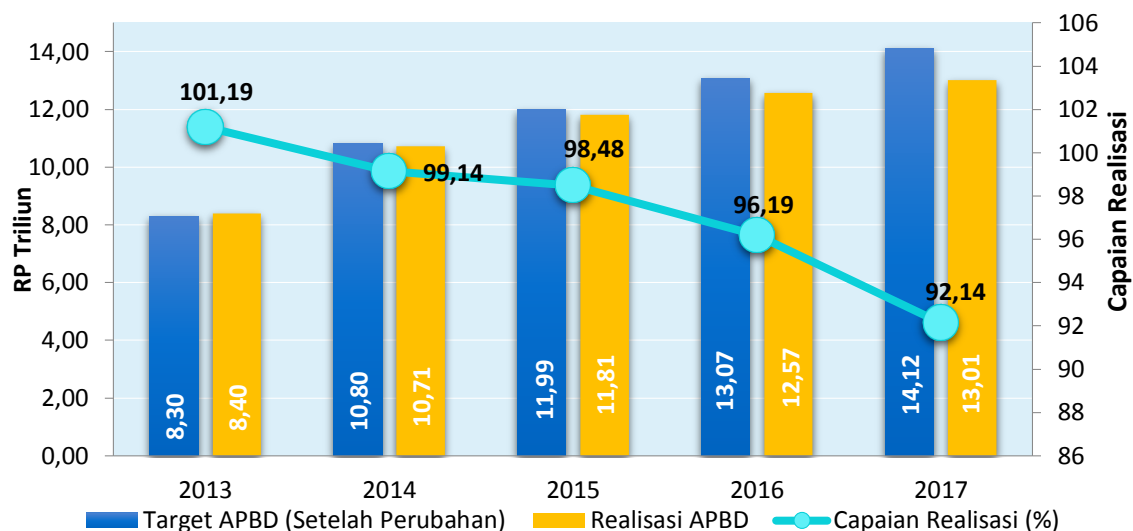
Selama periode tahun 2013-2017, hanya pada tahun 2013 target pendapatan dapat direalisasikan dengan baik yang mencapai angka sebesar 101,2 persen, sedangkan periode tahun 2014-2017, realisasi pendapatan selalu berada dibawah target yang ditetapkan. Kondisi ini terutama disebabkan tidak terealisasinya beberapa sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2013	8.298.239.247.000,00	8.397.158.332.245,00	101,2%	98.919.085.245
2014	10.802.461.214.000,00	10.709.818.949.527,00	99,1%	(92.642.264.473)
2015	11.987.595.808.455,00	11.805.767.353.119,00	98,5%	(181.828.455.336)
2016	13.065.980.097.715,00	12.567.839.768.232,70	96,2%	(498.140.329.482)
2017	14.116.822.510.433,00	13.006.812.664.926,50	92,1%	(1.110.009.845.507)

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Gambar 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017



Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013-2017 (diolah)

3.1.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Permendagri No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Secara umum dari tahun 2013 sampai tahun 2017, jumlah anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tabel 3.3. berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Jumlah nominal belanja daerah Provinsi Papua pada tahun 2013

mencapai sebesar Rp 8,94 trilyun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 15,65 trilyun pada tahun 2017.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan terlihat adanya peningkatan alokasi yang cukup signifikan pada kedua pos belanja yaitu; belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 11%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18% per tahun.

Semua pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkecuali belanja tidak terduga. Pos belanja pegawai secara perlahan namun pasti mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9% per tahun, kemudian belanja hibah mengalami pertumbuhan sebesar 13% per tahun, belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar 6% per tahun dan Belanja bantuan keuangan mengalami pertumbuhan sebesar 12% per tahun. Sedangkan pada pos belanja langsung terjadi peningkatan belanja yang cukup signifikan pada semua jenis belanja. Pada periode 2013-2017, belanja pegawai mengalami pertumbuhan rerata sebesar 14% per tahun, belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17% per tahun dan belanja modal mengalami pertumbuhan rerata sebesar 22% per tahun.

Tabel 3.3 Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (Rp juta)

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
Belanja	8.941.437	8.171.352	91%	11.520.664	10.303.787	89%	13.268.460	12.396.447	93%	13.601.165	11.968.494	88%	15.654.664	13.303.282	85%
Belanja Tidak Langsung	5.322.500	5.080.595	95%	6.842.740	6.419.562	94%	7.155.349	6.980.188	98%	7.563.695	6.782.511	90%	8.102.810	7.614.480	94%
Belanja Pegawai	733.505	657.546	90%	898.649	744.258	83%	1.006.629	919.022	91%	1.082.739	986.869	91%	1.319.848	1.110.723	84%
Belanja Hibah	685.960	651.084	95%	863.485	732.224	85%	885.017	835.350	94%	1.167.661	1.077.607	92%	1.038.385	1.025.283	99%
Belanja Bantuan Sosial	274.646	178.167	65%	157.227	88.454	56%	100.034	94.309	94%	153.745	145.771	95%	101.028	96.897	96%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	233.162	232.801	100%	280.831	280.781	100%	297.467	290.677	98%	362.829	313.262	86%	390.165	310.131	79%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.365.227	3.348.441	100%	4.612.843	4.562.249	99%	4.843.201	4.829.852	100%	4.791.205	4.258.952	89%	5.203.385	5.071.446	97%
Belanja Tidak Terduga	30.000	12.557	42%	29.705	11.595	39%	23.000	10.978	48%	5.516	49	1%	10.000	0	0%
Belanja Langsung	3.618.937	3.090.757	85%	4.677.924	3.884.225	83%	6.113.112	5.416.259	89%	6.037.470	5.185.984	86%	7.551.853	5.688.802	75%
Belanja Pegawai	195.333	175.894	90%	218.273	196.401	90%	214.620	190.579	89%	260.967	235.694	90%	274.065	248.630	91%
Belanja Barang dan Jasa	1.898.047	1.694.118	89%	2.189.514	1.998.521	91%	2.729.760	2.360.218	86%	2.838.475	2.459.957	87%	3.821.939	3.112.159	81%
Belanja Modal	1.525.557	1.220.745	80%	2.270.138	1.689.303	74%	3.168.733	2.865.462	90%	2.938.028	2.490.333	85%	3.455.849	2.328.013	67%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013– 2017 (diolah)

Keterangan

A= Anggaran

R = Realisasi

Rencana dan Realisasi Belanja Daerah

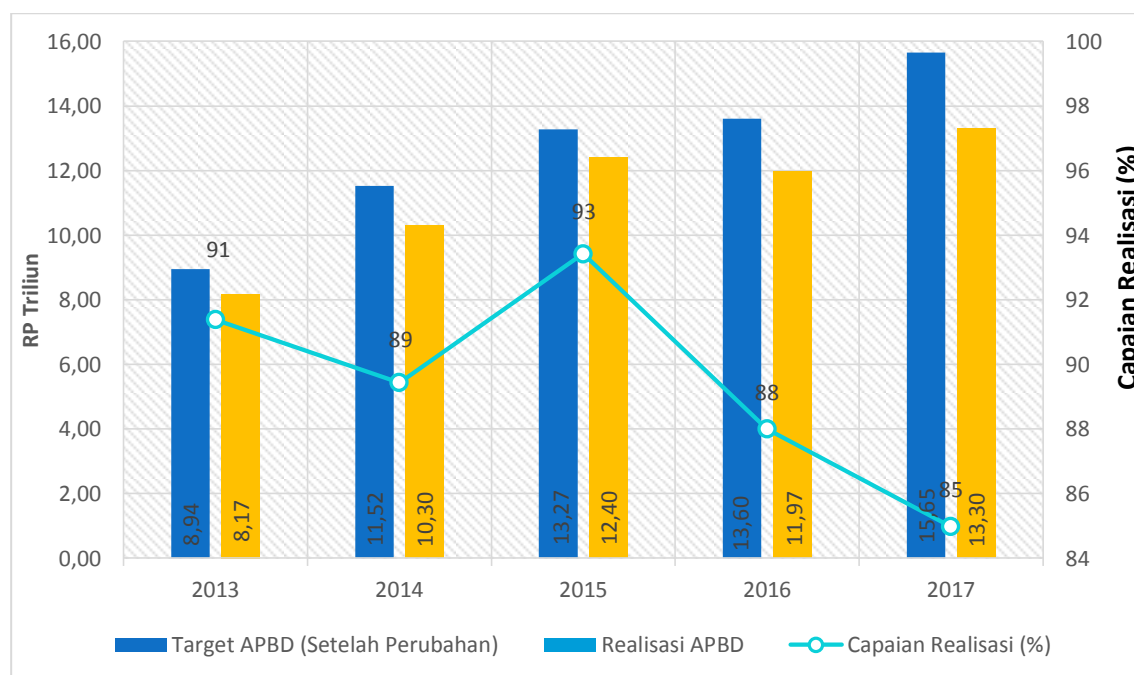
Selama periode tahun 2013-2017, realisasi belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang dapat diwujudkan oleh daerah yang hanya mencapai kisaran angka sebesar 85% sampai dengan 93%.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	%	Selisih
2013	8.941.437.247.000,00	8.171.352.348.477,00	91%	(770.084.898.523,00)
2014	11.520.664.078.000,00	10.303.786.846.381,00	89%	(1.216.877.231.619,00)
2015	13.268.460.356.704,00	12.396.447.236.264,00	93%	(872.013.120.440,00)
2016	13.601.164.762.819,00	11.968.494.421.588,20	88%	(1.632.670.341.230,78)
2017	15.654.663.746.433,00	13.303.282.243.301,10	85%	(2.351.381.503.131,92)

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Gambar 3.4 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017



Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013– 2017 (diolah)

3.1.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Berdasarkan data pada tabel 3.5. terlihat bahwa sepanjang periode tahun 2013-2017 Pemerintah Provinsi Papua selalu menerapkan penganggaran defisit yang selalu akan ditutupi dengan Sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Dalam kenyataannya realisasi anggaran memang selalu menghasilkan jumlah SILPA yang signifikan untuk menutupi defisit yang terjadi.

Tabel 3.5 Perkembangan Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta)

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
Surplus/ Defisit	-643.198	225.806	-35%	-718.203	406.032	-57%	-1.280.865	-590.680	46%	-535.185	599.345	-112%	-1.537.841	-296.470	19%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	768.198	768.416	100%	833.203	833.203	100%	1.305.865	1.180.865	90%	565.185	503.496	89%	1.612.841	1.009.244	63%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	768.198	768.416	100%	833.203	833.203	100%	1.055.865	1.055.865	100%	565.185	503.496	89%	1.072.841	1.009.244	94%
Pencairan Dana Cadangan				0	0	0%	250.000	125.000	50%	0	0	0%	540.000	0	0%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	125.000	161.019	129%	115.000	183.370	159%	25.000	25.000	100%	30.000	30.000	100%	75.000	140.462	187%
Pembentukan Dana Cadangan				0	68.370	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	65.462	0%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000	25.000	100%	115.000	115.000	100%	25.000	25.000	100%	30.000	30.000	100%	75.000	75.000	100%
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pihak Ketiga	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Pembiayaan Netto	643.198	607.397	94%	718.203	649.832	90%	1.280.865	1.155.865	90%	535.185	473.496	88%	1.537.841	868.782	56%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0	833.203	0%	0	1.055.865	0%	0	565.185	0%	0	1.072.841	0%	0	572.312	0%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Keterangan

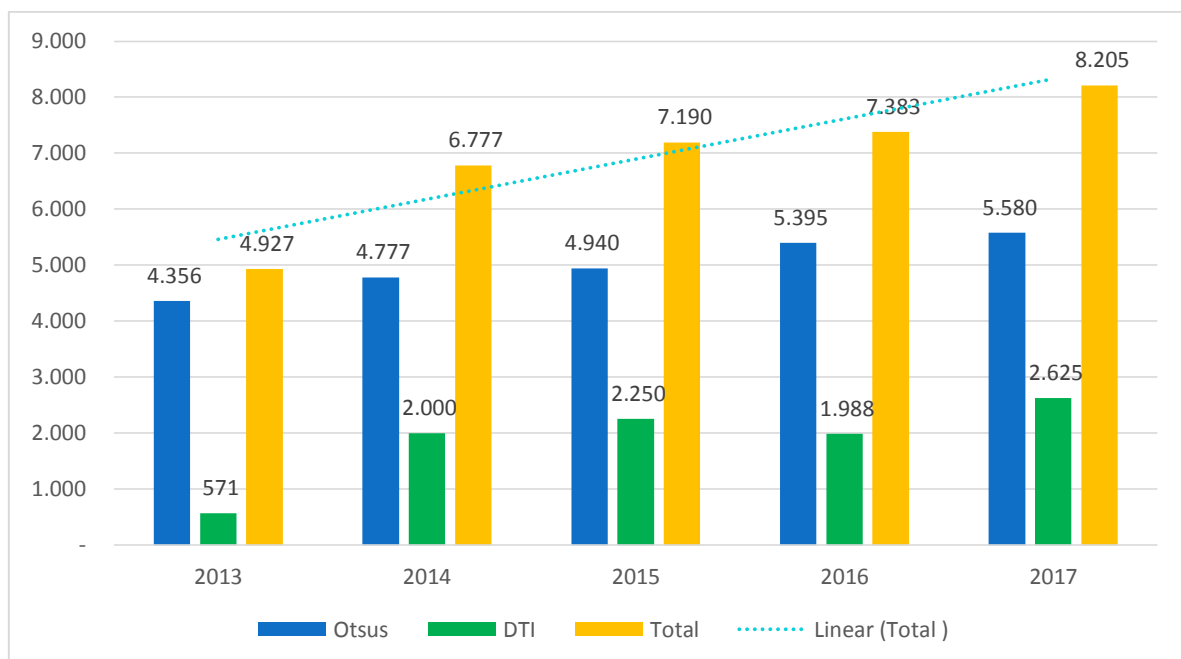
A= Anggaran

R = Realisasi

3.1.2. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua

Selama periode pertama masa kepemimpinan Bapak. Lukas Enembe, SIP, MH sebagai Gubernur di Provinsi Papua pada tahun 2013–2017, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana otsus (DO) dan dana tambahan Infrastruktur (DTI) kepada Provinsi Papua mencapai sebesar Rp. 34,4 triliun, yang terdiri dari sebesar Rp. 25,04 trilyun DO dan sebesar Rp.9,43 trilyun berupa DTI. Gambar 3.5. menunjukkan bahwa terkecuali pada tahun 2016, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur secara konsisten terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan alokasi DAU nasional. Dana otsus secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen pertahun dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus mengalami pertumbuhan rerata sebesar 11 persen pertahun.

Gambar 3.5 Penerimaan Dana Otsus Periode 2013-2017



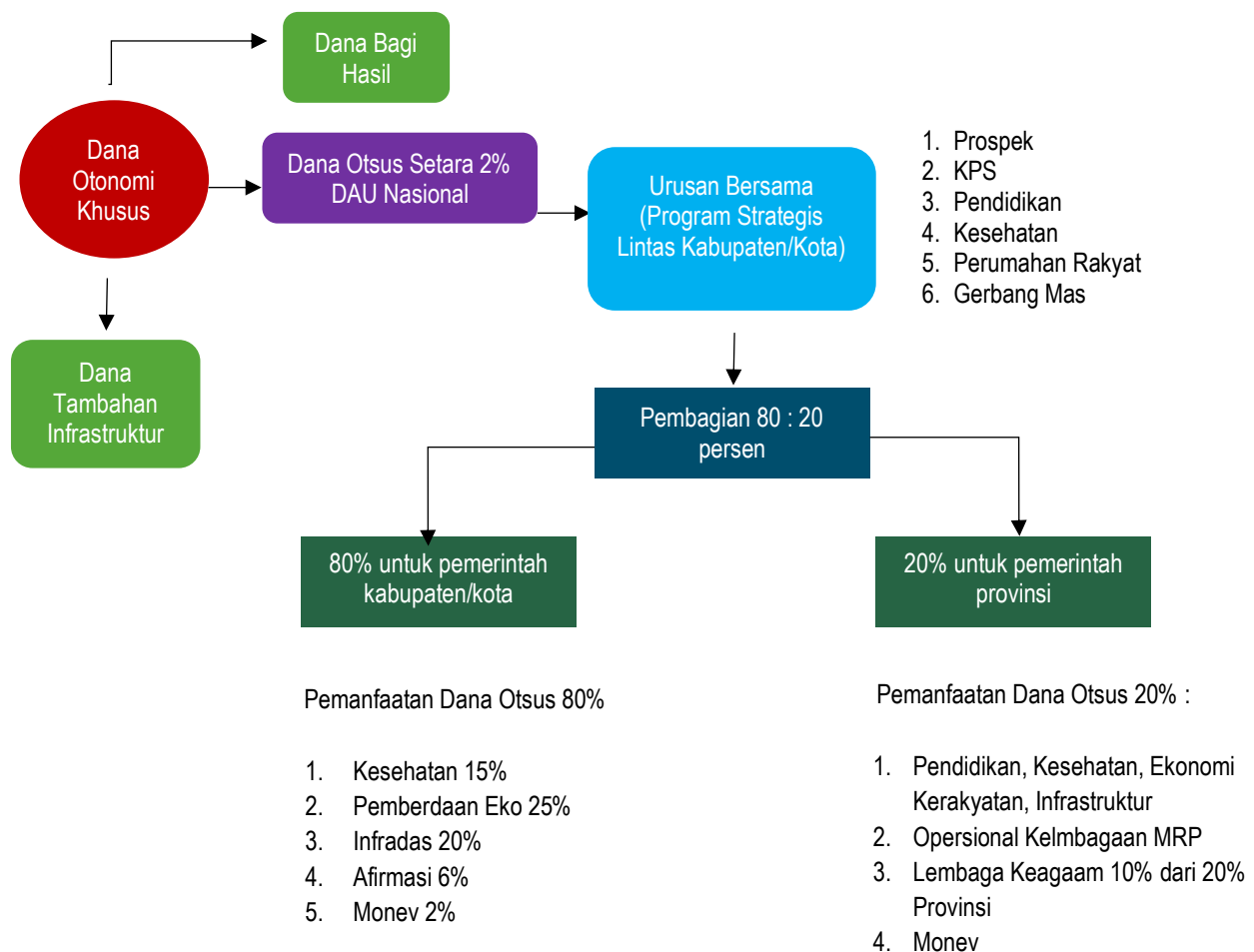
Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Pemerintah Provinsi Papua mengatur pembagian penerimaan dana Otsus melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Perdasus ini efektif berlaku untuk pembagian dana Otsus tahun anggaran 2014. Sebelum tahun tersebut, pembagian dana Otsus mengacu pada yang Perdasus Nomor 1 Tahun 2007. Perbedaan pokok antara kedua Perdasus tersebut terjadi untuk pembagian dana

antara Provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Perdasus Nomor 1 Tahun 2007 diatur pembagian antara Provinsi dan kabupaten/kota 40% dan 60%, sedang dalam Perdasus 25 Tahun 2013 pembagian Provinsi dan kabupaten/kota 20% dan 80%.

Pembagian dana Otsus dengan porsi makin besar ke kabupaten/kota (80%) dilakukan Provinsi Papua dengan beberapa pertimbangan. Pertama, sesuai amanat UU21/2001 bahwa kebijakan Otsus Papua ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi Orang Asli Papua (OAP) yang sebagian besar berada dibawah kewenangan pemerintah kabupaten/ kota. Kedua, bahwa sesuai dasar pemerintah Provinsi relatif diberi kewenangan perundangan untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring hasil pembangunan yang dilaksanakan kabupaten/kota. Ketiga, bahwa dari sisi kedekatan dengan warga masyarakat, kabupaten/kota lebih dekat dan banyak mengetahui kondisi, keberadaan, masalah dan kebutuhan warganya.

Gambar 3.6. Skema Sumber Dana Dan Pembagian Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2013-2017



Sumber : data diolah

Berdasarkan data realisasi pelaksanaan dana otsus Papua tahun 2013-2017 terlihat bahwa dana otonomi khusus Papua teralokasi pada sektor-sektor yang telah ditentukan dalam Perdasus terkait. Selama periode tersebut terlihat bahwa besarnya alokasi dana untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hampir sama setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp. 3,08 trilyun pertahun yang teralokasi bagi 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua serta sebesar Rp.772,2 milyar yang teralokasi pada belanja langsung program-program SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sedangkan dana urusan bersama yang merupakan sharing dana antara provinsi dan kabupaten/kota terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan penerimaan dana otonomi khusus Papua.

Jika ditelusuri lebih jauh tentang pengalokasian dana urusan bersama ini umumnya teralokasi pada program-program prioritas kepala daerah yang diberlakukan di seluruh wilayah Provinsi Papua, beberapa program tersebut antara lain; Program strategis pembangunan kampung (PROSPEK), Program Kartu Papua Sehat (KPS), Program Gerakan Bangkit Mandiri Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua), bantuan keuangan pada lembaga sosial, budaya dan keagamaan, beasiswa pada putra putra terbaik Papua yang mengikuti pendidikan di beberapa Universitas dalam dan luar negeri.

Tabel 3.6. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Porsi Provinsi	1.536.142	772.297	772.295	772.295	772.295
Dana Urusan Bersama	515.595	915.594	1.078.956	1.533.578	1.718.679
Porsi Kabupaten/Kota	2.304.213	3.089.179	3.089.179	3.089.179	3.089.179
Total Penerimaan Otsus	4.355.950	4.777.071	4.940.430	5.395.052	5.580.152

Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Berdasarkan hasil pelaksanaan program otonomi khusus selama ini yang disokong dengan keberadaan dana otonomi khusus maka perlu disadari bahwa kedepan perancangan formula pembagian dana Otonomi Khusus Papua baik yang dimaksudkan untuk didistribusikan bagi masing-masing kabupaten dan kota serta provinsi, maupun yang disalurkan melalui mekanisme strategis lain harus

ditempatkan sebagai instrumen perantara untuk peningkatan kesejahteraan terutama Orang Asli Papua. Hal ini penting karena kehadiran dana otsus Papua merupakan konsekwensi lanjutan dari disepakatinya secara politis kebijakan desentralisasi asimetris sebagai model pengelolaan kawasan ini. Sebuah kesepakatan yang dimaksudkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan dasar – mulai dari rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat hingga belum stabilnya kondisi keamanan di beberapa wilayah.

3.1.3. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, dan Dana Investasi, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Untuk lebih mengetahui tentang perkembangan neraca daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal aset daerah mengalami pasang surut

seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua, namun demikian secara umum aset daerah mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 3 persen. Pada tahun 2013, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp 16,99 trilyun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 21,46 trilyun pada tahun 2014. Pada tahun 2015, nilai total aset menurun menjadi sebesar Rp 16,09 trilyun yang kemudian kembali meningkat menjadi sebesar Rp 19,12 trilyun pada tahun 2016 dan menjadi sebesar Rp 21,83 trilyun pada tahun 2017..

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada pos kewajiban daerah terlihat bahwa sepanjang tahun 2013-2017 Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua hanya kewajiban jangka pendek berupa hutang pada pihak ketiga, hutang dana BOS dan hutang belanja. Dari data neraca terlihat bahwa sepanjang tahun 2013-2017, jumlah hutang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rerata mencapai sebesar 39 persen pertahun. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah.

Pada sisi lain, selama periode tahun 2013-2017, Nilai ekuitas dana Provinsi Papua mengalami sedikit perubahan yang mencapai rata-rata sebesar 3 persen pertahun. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Tabel 3.7. Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth
A	ASET	16.998.626.993.863	21.463.852.247.807	16.090.766.721.646	19.128.988.032.431	21.183.444.555.922	3%
1	ASET LANCAR	985.969.083.943	3.450.729.690.440	2.978.758.265.176	4.120.164.794.112	3.991.399.011.372	20%
01.01	Kas di Kas Daerah	825.998.845.011	1.045.409.962.130	560.578.663.641	1.050.054.257.807	558.830.624.940	-27%
01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	1.238.669	3.011.907.524	5.274.882.592	1.395.653.527	6.767.731.492	-14%
01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.272.797.231	10.510.956.767	973.909.486	12.183.375.418	6.720.182.766	-234%
01.04	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
01.05	Piutang Pajak	2.400.059.360	2.265.807.470.384	2.265.650.959.957	2.532.288.754.218	2.207.306.829.466	24%
01.06	Piutang Retribusi	-	-	6.397.637.052	-	-	100%
01.07	Piutang Bagian Lancar Pinjaman	-	-	-	-	-	-
01.08	Piutang Kelebihan Transfer	-	27.652.600.936	-	-	-	100%
01.09	Piutang Jamkesmas/ BPJS Kesehatan	10.981.677.779	3.152.030.950	-	-	-	-248%
01.10	Piutang Lainnya netto	10.059.062.846	7.523.543.347	24.582.319.732	231.014.284.015	21.531.441.558	-212%
01.11	Belanja Dibayar Muka	37.500.000	61.643.836	360.290.410	1.129.216.578	55.890.411	-433%
01.12	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	4.264.621.838	2.244.998.370	2.309.075.903	4%
01.13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-	-	1.341.433.200	993.338.600	32%
01.14	Persediaan	129.217.903.047	87.599.574.566	110.674.980.468	288.512.820.979	1.186.883.896.236	28%
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	449.848.474.520	751.943.066.573	795.099.855.048	847.615.831.875	841.849.351.734	13%

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth
02.01	Investasi Non Permanen	-	-	-	36.395.781.663	36.395.781.663	50%
02.01.01	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	36.395.781.663	36.395.781.663	50%
02.02	Investasi Permanen						
02.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	449.848.474.520	751.943.066.573	795.099.855.048	847.615.831.875	841.849.351.734	13%
3	ASET TETAP	13.542.429.036.403	15.188.134.904.772	11.239.435.289.966	12.971.512.017.915	15.077.385.904.115	1%
03.01	Tanah	1.289.084.094.264	1.309.597.025.264	1.354.594.625.264	1.387.610.080.264	1.602.938.265.264	5%
03.02	Peralatan dan Mesin	808.525.026.146	952.319.800.319	1.189.409.608.641	1.367.487.906.692	1.459.752.039.552	14%
03.03	Gedung dan Bangunan	1.696.319.692.064	1.827.931.953.074	2.207.173.307.922	2.360.442.099.690	2.764.353.210.497	11%
03.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi	8.897.042.929.541	9.506.321.531.751	11.170.859.291.020	12.201.586.998.744	14.187.649.996.901	11%
03.05	Aset Tetap Lainnya	324.956.124.302	354.705.231.702	389.307.400.512	441.935.489.612	443.644.985.082	7%
03.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	526.501.170.086	1.237.259.362.662	1.841.588.226.079	2.792.990.073.353	2.912.071.837.108	32%
03.07	Akumulasi Penyusutan	-	-	- 6.913.497.169.472	-7.580.540.630.440	-8.293.024.430.289	39%
4	DANA CADANGAN	946.923.717.123	1.015.294.136.130	970.843.819.969	1.032.572.663.172	1.098.034.927.308	4%
04.01	Dana Cadangan	946.923.717.123	1.015.294.136.130	970.843.819.969	1.032.572.663.172	1.098.034.927.308	4%
5	ASET LAINNYA	1.073.456.681.874	1.057.750.449.892	106.629.491.487	120.769.061.934	138.379.579.730	-217%
05.01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	2.124.771.197	1.236.634.777	2.601.224.349	2.309.125.457	-	-4%
05.02	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-				
05.03	Kemitraandengan Pihak Ketiga	-	-				

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth
05.04	Aset Tidak Berwujud	-	-	6.224.659.000	5.848.465.771	4.198.607.461	18%
05.05	Aset Lain-lain	450.186.612.180	427.287.461.179	97.803.608.138	112.611.470.706	131.495.322.799	-79%
05.06	Aset Tetap Yang Rusak	2.848.690.256	2.848.690.256	-	-	-	0%
05.07	Aset Tetap Yang Dihilangkan	558.132.567.550	566.256.867.550	-	-	-	1%
05.08	Piutang Kelebihan Pembayaran	17.496.681.068	17.496.681.068	-	-	-	0%
05.09	Kas Bendahara yg Belum Dipertanggungjawabkan	41.462.689.726	41.462.689.726	-	-	-	0%
B	KEWAJIBAN	13.556.812.066	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713	39%
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.556.812.066	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713	39%
01.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	668.881.129	277.792.999	6.050.250	-1511%
01.02	Utang Bos			-	18.378.432.500	80.044.808.500	89%
01.03	Utang Bunga	-	-	-	-	-	
01.04	Utang Pajak	-	-	-	-	-	
01.05	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	
01.06	Utang belanja		3.186.653.000	66.747.719	217.817.743	5.379.701.349	-1102%
01.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.488.033.934	22.904.010.228	25.774.156.125	281.113.111.102	276.403.865.614	35%
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
02.01	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-		
02.02	Utang Luar Negeri	-	-	-	-		

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth
C	EKUITAS DANA	16.985.070.181.797	21.437.705.213.931	16.064.256.936.673	18.829.000.878.087	20.821.610.130.209	3%
1	EKUITAS DANA LANCAR	972.412.271.877	3.424.582.656.564	-	-	-	72%
01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	833.202.864.110	1.055.864.548.249	-	-	-	21%
01.02	Cadangan Untuk Piutang	23.440.799.985	2.304.135.645.617	-	-	-	99%
01.03	Cadangan Untuk Persediaan	129.217.903.047	87.599.574.566	-	-	-	-48%
01.04	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	- 13.488.033.934	- 26.090.663.228	-	-	-	48%
01.05	Pendapatan yang Ditangguhkan	1.238.669	3.011.907.524	-	-	-	100%
01.06	Cadangan Asuransi Dibayar Dimuka	37.500.000	-	-	-	-	
01.07	Cadangan Untuk Sewa Dibayar Dimuka	-	61.643.836	-	-	-	100%
2	EKUITAS DANA INVESTASI	15.065.734.192.797	16.997.828.421.237	-	-	-	11%
02.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	449.848.474.520	751.943.066.573	-	-	-	40%
02.02	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	13.542.429.036.403	15.188.134.904.772	-	-	-	11%
02.03	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	1.073.456.681.874	1.057.750.449.892	-	-	-	-1%
02.04	Dana yang harus disediakan untuk	-	-	-	-	-	

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth
	pembayaran Utang Jangka Panjang						
3	EKUITAS DANA CADANGAN	946.923.717.123	1.015.294.136.130	-	-	-	7%
03.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	946.923.717.123	1.015.294.136.130	-	-	-	7%
03.02	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan						
03.03							
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16.998.626.993.863	21.463.852.247.807	16.090.766.721.646	19.128.988.032.431	21.183.444.555.922	3%

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Papua 2013-2017

Selain analisis di atas, analisis neraca daerah juga memberikan informasi tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya,

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Tabel 3.7. menunjukkan hasil perhitungan rasio lancar pada neraca keuangan pemerintah Provinsi Papua yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Papua dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak boleh kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Provinsi Papua adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Papua relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya.

Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

Tabel 3.8. Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua

RASIO	RUMUS	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	974.949.906.164	3.450.729.690.440	2.978.758.265.176	4.120.122.675.872	3.991.399.011.372
	Kewajiban Jangka Pendek	13.488.033.934	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713
	Rasio Lancar	72,283	131,974	112,364	13,734	11,031
	Aset Lancar – Persediaan	845.732.003.117	3.363.130.115.874	2.868.083.284.708	3.831.609.854.893	2.804.515.115.136
	Kewajiban Jangka Pendek	13.488.033.934	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713
	Quick Ratio	62,702	128,624	108,190	12,773	7,751
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	13.556.812.066	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713
	Total Aset	16.998.626.993.863	21.463.852.247.807	16.090.766.721.646	19.128.988.032.431	21.183.444.555.922
	Rasio Total Hutang (%)	0,0008	0,0012	0,0016	0,0157	0,0171
	Total Hutang	13.556.812.066	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713
	Total Ekuitas	16.985.070.181.797	21.437.705.213.931	16.064.256.936.673	18.829.000.878.087	20.821.610.130.209
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,0008	0,0012	0,0017	0,0159	0,0174

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Papua 2013-2017 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Provinsi Papua selama ini merupakan bauran strategi penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelanjaan daerah disamping menjaga keseimbangan surplus dan defisit anggaran yang mengarah pada penciptaan keberlanjutan fiskal daerah.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya;
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berkenaan yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya;
- c) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, telah mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi Papua terdiri dari; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan sumber Daya Alam.

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir.
- c) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun

Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DAU dan DAK didasarkan pada realisasi pendapatan DAU dan DAK selama 3 (tiga) tahun terakhir.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Dana Otonomi Khusus Papua merupakan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau sebesar 2% (dua perseratus) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional. Penganggarnya disesuaikan dengan Perdasus Papua Tentang Pengalokasian dana Otonomi Khusus Papua;
- b) Dana Tambahan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Otonomi khusus Papua yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran.
- c) Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- d) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah

3.2.1.1. *Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja*

Selama periode tahun 2013-2017, proporsi belanja tidak langsung menyerap anggaran sebesar 58,9%, sedangkan belanja langsung menyerap anggaran rerata sebesar 41,1%. Besarnya proporsi anggaran belanja tidak langsung dalam hal ini terkait dengan adanya transfer dana otonomi khusus Papua dan dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Tabel 3.9. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Proporsi Rerata
Belanja Tidak Langsung	62,2%	62,3%	56,3%	56,7%	57,2%	58,9%
Belanja Pegawai	8,0%	7,2%	7,4%	8,2%	8,3%	7,9%
Belanja Hibah	8,0%	7,1%	6,7%	9,0%	7,7%	7,7%
Belanja Bantuan Sosial	2,2%	0,9%	0,8%	1,2%	0,7%	1,1%
Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota	2,8%	2,7%	2,3%	2,6%	2,3%	2,6%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung	41,0%	44,3%	39,0%	35,6%	38,1%	39,6%
Belanja Tidak Terduga	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Proporsi Rerata
Belanja Langsung	37,8%	37,7%	43,7%	43,3%	42,8%	41,1%
Belanja Pegawai	2,2%	1,9%	1,5%	2,0%	1,9%	1,9%
Belanja Barang dan Jasa	20,7%	19,4%	19,0%	20,6%	23,4%	20,6%
Belanja Modal	14,9%	16,4%	23,1%	20,8%	17,5%	18,6%
TOTAL BELANJA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Jika dilihat dari pos jenis belanja, terlihat cukup besarnya alokasi anggaran untuk belanja bantuan keuangan yang sepanjang tahun 2013-2017 menyerap alokasi anggaran sebesar 39,6% dari total belanja daerah, kemudian pos belanja barang dan jasa menyerap anggaran sebesar 20,6% dan belanja modal menyerap anggaran sebesar 18,6% dari total belanja per tahunnya.

3.2.1.2. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam hal ini digunakan untuk pembelanjaan yang terkait dengan penyediaan jasa-jasa umum yang menjadi pendukung bagi berjalannya pemerintahan dan pembangunan secara umum. Belanja-belanja ini terurai kedalam kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah serta menyebar kedalam berbagai jenis, objek dan rincian objek belanja yang ada.

Selanjutnya gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Papua periode tahun 2013 s/d 2017 ditampilkan pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.10. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
BELANJA	2.013.959.249.673	2.252.348.420.726	2.809.213.246.247	2.938.037.573.985	3.167.730.920.993
BELANJA TIDAK LANGSUNG	657.545.844.872	744.258.374.534	933.275.370.494	986.869.094.636	1.110.723.063.509
Belanja Pegawai	657.545.844.872	744.258.374.534	933.275.370.494	986.869.094.636	1.110.723.063.509
Gaji Dan Tunjangan	374.260.754.421	391.509.678.108	436.332.687.369	483.082.144.233	471.086.850.106
Tambahan Penghasilan PNS	258.674.516.451	325.922.904.676	453.701.766.703	480.663.064.897	613.491.270.240
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	8.302.835.000	8.680.360.000	14.643.473.500	10.478.960.000	7.656.155.000
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	5.000.000.000	2.500.000.000	14.253.046.461	12.197.325.506	18.038.788.163
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	10.976.940.000	15.165.233.750	14.253.046.461	0	
Insentif Pemungutan Restribusi Daerah	330.799.000	480.198.000	91.350.000	447.600.000	450.000.000
BELANJA LANGSUNG	1.356.413.404.801	1.508.090.046.192	1.875.937.875.753	1.951.168.479.349	2.057.007.857.484
Belanja Pegawai	174.522.914.813	195.383.425.935	190.579.264.830	235.693.717.681	248.630.252.397
Honorarium PNS	80.069.332.340	83.515.295.500	103.874.321.083	131.991.409.694	130.406.659.665
Honorarium Non PNS	91.129.358.973	111.668.505.435	86.704.943.747	103.702.307.987	118.223.592.732
Uang Lembur	3.324.223.500	199.625.000	0	0	0
Belanja Barang dan Jasa	952.755.527.335	1.121.464.345.247	1.533.983.284.237	1.605.853.505.044	1.735.095.895.196
Belanja Bahan Pakai Habis	78.681.162.815	66.551.366.473	95.207.657.370	89.216.627.796	85.622.773.847
Belanja Bahan/Material	117.056.015.067	119.497.911.667	110.854.765.351	100.947.906.171	108.920.021.952
Belanja Jasa Kantor	91.217.330.186	100.664.946.335	288.743.487.337	239.428.256.295	223.725.404.342
Belanja Premi Asuransi	2.716.100.000	2.825.900.000	107.900.000	166.593.600	160.130.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.695.632.041	27.001.806.349	32.041.140.946	30.033.238.257	30.282.834.419
Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.564.379.427	58.221.982.773	62.389.121.465	63.910.032.225	56.532.905.642
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.041.830.000	30.060.077.000	2.623.135.000	8.858.617.360	12.371.349.080
Belanja Makanan Dan Minuman	168.037.845.039	318.970.531.208	424.104.810.889	541.158.265.600	697.323.365.568
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	9.266.876.135	11.563.163.320	11.866.039.062	11.113.990.650	10.506.521.920
Belanja Pakaian Kerja	2.955.577.180	1.325.307.250	1.462.334.400	3.203.386.000	1.809.063.000
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	6.211.769.115	6.093.608.301	6.888.233.900	6.374.575.250	5.937.993.840

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Belanja Perjalanan Dinas	295.024.583.952	294.886.959.066	351.810.080.031	431.581.077.165	373.005.365.604
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	21.952.825.000	22.252.566.000	2.661.499.000	248.667.150	
Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	31.925.832.378	26.863.767.505	53.444.923.021	57.965.516.025	49.887.910.957
Belanja Jasa Konsultansi	29.407.769.000	34.684.452.000	89.778.156.465	21.646.755.500	79.010.255.025
Belanja Modal	229.134.962.653	191.242.275.010	151.375.326.686	109.621.256.625	73.281.709.891
Belanja Modal Pengadaan Tanah	28.541.350.000	12.328.862.000	0		
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat					
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	39.104.151.550	14.765.667.600	52.907.533.350	17.564.617.775	8.033.640.106
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	4.622.157.000	8.870.670.000	924.576.000		147.670.833
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	405.800.000	593.631.500		12.475.000	1.029.600.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	1.595.047.000	0			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.251.657.300	2.489.370.520	8.439.274.700	5.762.820.188	7.993.681.990
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.824.169.858	8.532.978.223			
Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.361.930.660	16.929.145.735	20.468.430.500	16.219.759.245	22.015.731.812
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.392.457.139	17.520.437.714			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.332.860.271	2.293.060.357			
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	13.732.869.748	4.164.872.061			
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.490.638.317	15.197.182.160	5.945.738.260	7.573.082.565	2.735.140.310
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.514.761.400	776.191.200	589.825.000	621.231.000	37.500.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	445.227.000	1.064.822.440	422.719.000	415.959.000	369.740.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	32.313.129.110	71.010.771.300	61.595.138.246	61.156.359.152	30.919.004.840
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	26.692.756.300	14.224.362.200		274.952.700	
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian. Kebudayaan	514.000.000	480.250.000	82.091.630	20.000.000	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013-2017 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami pasang surut, seiring dengan peningkatan kebutuhan pemerintah daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana aparatur guna menunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Pada tahun 2013, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar 24% yang kemudian menurun menjadi sebesar 21% pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 23% dan meningkat lagi menjadi 24% pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 3.11. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2013	2.013.959.249.673	8.332.371.000.000	24%
2.	Tahun Anggaran 2014	2.252.348.420.726	10.487.157.000.000	21%
3.	Tahun Anggaran 2015	2.809.213.246.247	12.421.447.000.000	23%
4.	Tahun Anggaran 2016	2.938.037.573.985	11.998.494.000.000	24%
5.	Tahun Anggaran 2017	3.167.730.920.993	13.443.745.000.000	24%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

3.2.1.3. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 3.12. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Uraian	Jumlah (Rp.Juta)					Rerata Pertumb uhan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Belanja Tidak Langsung	5.080.595	6.419.562	6.980.188	6.782.511	7.614.480	11%
Belanja Pegawai	657.546	744.258	919.022	986.869	1.110.723	14%
Belanja Hibah	651.084	732.224	835.350	1.077.607	1.025.283	13%
Belanja Bantuan Sosial	178.167	88.454	94.309	145.771	96.897	-6%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	232.801	280.781	290.677	313.262	310.131	8%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.348.441	4.562.249	4.829.852	4.258.952	5.071.446	12%
Belanja Tidak Terduga	12.557	11.595	10.978	49	-	-53%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.000	183.370	25.000	30.000	140.462	101%
Pembentukan Dana Cadangan		68.370	-	-	65.462	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000	115.000	25.000	30.000	75.000	31%
JUMLAH	5.105.595	6.602.932	7.005.188	6.812.511	7.754.942	6%

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Provinsi Papua selama kurun waktu tahun 2013 s.d 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.13. Defisit Riil APBD Provinsi Papua Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp.juta)	2014 (Rp.juta)	2015 (Rp.juta)	2016 (Rp.juta)	2017 (Rp.juta)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	8.397.158	10.709.819	11.805.767	12.567.840	13.006.813
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	8.171.352	10.303.787	12.396.447	11.968.494	13.303.282
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	161.019	183.370	25.000	30.000	140.462
	Defisit Riil	64.787	222.662	-615.680	569.346	-436.931

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Dari tabel terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2013-2017 terjadi fluktuasi defisit riil pada setiap tahunnya, kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain berasal dari adanya pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.

Tabel 3.14. Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Provinsi Papua Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proporsi Dari Defisit Riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100%	100%	79%	100%	100%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	21%	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Sedangkan komposisi penutup defisit riil umumnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Tabel 3.12 menunjukkan bahwa secara umum defisit riil ditutupi oleh SILPA, hanya pada tahun 2015, defisit riil juga ditutup

dengan pencairan dana cadangan yang mencapai angka sebesar 21 % dari defisit riil yang terjadi.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Langkah langkah yang dilakukan adalah memproyeksi masing-masing pos penerimaan daerah yang selanjutnya dialokasikan pada pengeluaran daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah terutama diasumsikan dari realisasi pertumbuhan yang dihasilkan selama lima tahun belakangan dengan tambahan asumsi-asumsi yang berasal dari informasi kebijakan yang relevan. Beberapa asumsi tersebut antara lain;

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen pertahun atau tidak jauh dari proyeksi angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua periode tahun 2018 s/d 2023. Dalam perspektif ini dapat dinyatakan bahwa otoritas pengelola pendapatan daerah Provinsi Papua mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan realisasi penerimaan yang berasal dari PAD, melalui;
 - a. peningkatan realisasi pajak dan retribusi daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta modernisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Adanya peningkatan kontribusi pembagian deviden dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD diantaranya yang berasal dari PT Bank Papua;

- c. Adanya peningkatan efektivitas pengelolaan dana kas daerah melalui peningkatan efektivitas manajemen idle cash daerah
- 2. Dana perimbangan diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 4 persen pertahun sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat. Hal ini didasarkan pada kondisi penerimaan daerah dari dana perimbangan pada beberapa tahun belakangan.
 - a. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara
 - b. Adanya kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
 - c. DAK baik fisik maupun non fisik diasumsikan tetap sesuai dengan format pengalokasiannya yang didasarkan pada subjektivitas dari pemerintah pusat
- 3. Sesuai dengan peningkatan penerimaan negara setiap tahunnya, maka diasumsikan juga berpengaruh pada peningkatan perolehan Papua dari dana otonomi khusus Papua yang merupakan proporsi 2 persen dari DAU nasional atau yang nantinya akan dipersamakan dengan pos dana otsus tersebut. Dana otsus dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen pertahun.

Dalam konteks berakhirnya masa pengalokasian dana otsus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus maka diasumsikan Pemerintah Pusat akan memberikan sumber dana baru yang jumlahnya minimal sama dengan alokasi dana otsus dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus.

B. Belanja Daerah

- 1. Belanja tidak langsung diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 4,5 persen pertahun dengan uraian asumsi sebagai berikut;

- a. Adanya peningkatan belanja pegawai sebesar 5 persen pertahun untuk mengakomodasi kenaikan gaji dan penambahan jumlah pegawai;
 - b. Adanya kenaikan belanja hibah rata-rata sebesar 3,5 persen pertahun guna mengantisipasi peningkatan hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan hibah pada lembaga organisasi yang menunjang penyelenggaraan program pembangunan daerah terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat;
 - c. Plafon belanja bantuan sosial diasumsikan tetap setiap tahun, terutama yang akan dialokasikan pada bantuan-bantuan pada kelompok-kelompok masyarakat formal terutama lembaga sosial, adat dan keagamaan;
 - d. Belanja bantuan keuangan terutama diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5% pertahun sesuai dengan asumsi besar pertumbuhan alokasi penerimaan dana otonomi khusus papua. Pos belanja bantuan keuangan ini terutama akan dialokasikan untuk pengalokasian 80 porsi dana otonomi khusus papua yang menjadi bagian untuk kabupaten/kota. Disamping ini pos ini juga digunakan untuk bantuan keuangan pada program-program khusus yang penanganannya dilakukan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Papua;
 - e. Dana bagi hasil antara provinsi dan kabupaten/kota diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen pertahun sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah. Pos ini merupakan konsekuensi dari pembagian hasil Pajak kendaraan bermotor, bagi hasil pajak BBNKB, bagi hasil PBB-KB, bagi hasil pajak rokok dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
2. Seiring dengan asumsi peningkatan pendapatan daerah, belanja daerah diasumsikan juga akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen pertahun, yang terdistribusi menurut jenis belanja pegawai, belanja

barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan pengalokasian belanja langsung berdasarkan program daerah didasarkan pada kemampuan riil keuangan daerah.

Tabel 3.15. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	13.939.636.118.141	15.141.845.268.955	15.843.022.059.298	16.581.275.368.193	17.348.766.673.422
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	895.809.037.141	1.063.845.268.955	1.113.022.059.298	1.167.275.368.193	1.223.766.673.422
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	669.939.278.125	839.000.000.000	880.000.000.000	925.000.000.000	971.000.000.000
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	41.604.581.700	47.845.268.955	55.022.059.298	63.275.368.193	72.766.673.422
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.580.182.602	27.000.000.000	28.000.000.000	29.000.000.000	30.000.000.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.684.994.714	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
1.2.	Dana Perimbangan	4.411.150.386.000	4.775.000.000.000	4.959.000.000.000	5.151.000.000.000	5.355.000.000.000
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan SDA	648.886.554.000	840.000.000.000	882.000.000.000	926.000.000.000	973.000.000.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	2.616.545.381.000	2.835.000.000.000	2.977.000.000.000	3.125.000.000.000	3.282.000.000.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.145.718.451.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.632.676.695.000	9.303.000.000.000	9.771.000.000.000	10.263.000.000.000	10.770.000.000.000
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-		-	-	-
1.3.2.	Dana Otonomi khusus	5.808.230.158.000	6.153.000.000.000	6.461.000.000.000	6.783.000.000.000	7.123.000.000.000
1.3.3.	Dana Tambahan Infrastruktur	2.824.446.537.000	3.150.000.000.000	3.310.000.000.000	3.480.000.000.000	3.647.000.000.000
2	BELANJA	13.889.636.118.141	15.211.845.268.955	15.913.022.059.298	16.651.275.368.193	17.418.766.673.422
2.1.	Belanja Tidak Langsung	6.634.374.696.366	7.594.659.007.156	7.914.976.484.410	8.253.327.514.560	8.600.921.177.107
2.1.1.	Belanja Pegawai	2.728.997.543.848	2.865.447.421.040	3.008.719.792.092	3.159.155.781.697	3.317.113.570.782
2.1.2.	Belanja Hibah	1.212.829.878.600	1.273.471.372.530	1.337.144.941.157	1.404.002.188.214	1.474.202.297.625

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	65.380.508.471	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	459.263.805.847	482.226.996.139	506.338.345.946	531.655.263.244	558.238.026.406
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/PemDes	2.142.902.959.600	2.848.513.217.447	2.937.773.405.214	3.033.514.281.405	3.126.367.282.294
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	7.255.261.421.775	7.617.186.261.799	7.998.045.574.889	8.397.947.853.633	8.817.845.496.315
2.2.1.	Belanja Pegawai	280.798.315.300	294.000.000.000	308.700.000.000	324.135.000.000	340.342.000.000
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.018.589.277.765	4.219.518.741.653	4.430.494.678.736	4.652.019.412.673	4.884.620.383.306
2.2.3.	Belanja Modal	2.955.873.828.710	3.103.667.520.146	3.258.850.896.153	3.421.793.440.960	3.592.883.113.008
	Surplus/Defisit	50.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000
3	Pembiayaan Netto	- 50.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
	SiLPA		120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Penyertaan Modal	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

3.3.2.1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dalam APBD Papua dilakukan berdasarkan data realisasi besaran SiLPA periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Selama periode APBD 2018-2023 diperkirakan nilai SiLPA berada pada angka kisaran sebesar 120 milyar atau jauh lebih rendah dari realisasi yang terjadi selama ini. Asumsi utama yang digunakan dalam hal ini adalah proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.16. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Provinsi Papua Tahun 2018-2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Surplus/Defisit	50.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000
3	Pembiayaan Netto	(50.000.000.000)	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
	SiLPA		120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Penyertaan Modal	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

3.3.2.2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2018 sampai dengan periode Tahun 2023 diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan proyeksi peningkatan pendapatan terkait.

Tabel 3.17. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Papua Tahun 2018-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
02.01	Belanja Tidak Langsung	6.634.374.696.366	7.594.659.007.156	7.914.976.484.410	8.253.327.514.560	8.600.921.177.107
02.01.01	Belanja Pegawai	2.728.997.543.848	2.865.447.421.040	3.008.719.792.092	3.159.155.781.697	3.317.113.570.782
02.01.02	Belanja Hibah	1.212.829.878.600	1.273.471.372.530	1.337.144.941.157	1.404.002.188.214	1.474.202.297.625
02.01.03	Belanja Bantuan Sosial	65.380.508.471	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
02.01.04	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	459.263.805.847	482.226.996.139	506.338.345.946	531.655.263.244	558.238.026.406
02.01.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/PemDes	2.142.902.959.600	2.848.513.217.447	2.937.773.405.214	3.033.514.281.405	3.126.367.282.294
02.01.05	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Penyertaan Modal	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

3.3.2.3. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di atas, maka dihitung kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 3.18. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	13.939.636.118.141	15.141.845.268.955	15.843.022.059.298	16.581.275.368.193	17.348.766.673.422
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran		120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
3	Total Penerimaan	13.939.636.120.160	15.261.845.270.975	15.963.022.061.319	16.701.275.370.215	17.468.766.675.445
	Dikurangi					
4	Pengeluaran Mengikat	6.634.374.696.366	7.594.659.007.156	7.914.976.484.410	8.253.327.514.560	8.600.921.177.107
5	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6	Hutang Pemerintah Daerah	0	361.834.425.713	0	0	0
	Kapasitas Riil	7.255.261.423.794	7.255.351.838.106	7.998.045.576.910	8.397.947.855.655	8.817.845.498.338

3.3.2.3. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka dialokasikan untuk mendanai belanja tidak langsung dan belanja program pembangunan daerah yang dikelompokkan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas I, merupakan belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam rangka untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua sesuai dengan janji politik Gubernur, disamping program-program wajib dan mengikat sesuai dengan arahan pemerintah pusat terkait dengan agenda pembangunan nasional
2. Prioritas II, merupakan belanja tidak langsung dan belanja program pembangunan daerah terkait dengan prioritas perangkat daerah dalam rangka untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Tabel 3.19. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Kapasitas Riil	7.255.261.423.794	7.255.351.838.106	7.998.045.576.910	8.397.947.855.655	8.817.845.498.338
B	Penggunaan Kapasitas Riil	7.255.261.423.794	7.255.351.838.106	7.998.045.576.910	8.397.947.855.655	8.817.845.498.338
B.1.	Prioritas I					
	Belanja Langsung Program Prioritas untuk pencapaian visi dan misi Daerah Tahun 2018-2023	6.647.261.423.794	6.586.551.838.106	7.262.365.576.910	7.588.699.855.655	7.927.672.698.338
B.2.	Prioritas II					
02.01	Belanja Langsung 6 Program Rutin pada seluruh Perangkat Daerah	608.000.000.000	668.800.000.000	735.680.000.000	809.248.000.000	890.172.800.000

3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Provinsi Papua

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah diantaranya adalah:

- 1) Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan perangkat daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kinerja BUMD dan perusahaan daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 5) Meningkatkan pendayagunaan aset-aset daerah guna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 6) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 7) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan dana perimbangan;

- 8) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mengupayakan Dana Perimbangan terutama dana bagi hasil sumber daya alam, DAU dan DAK serta dana dana yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi khusus papua.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti :

1. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua tahun 2018-2023;
2. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Maney Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*) dalam rangka memenuhi janji politik dan program piriritas kepala daerah
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan di jabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses
5. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
6. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah;

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah yang memberikan tingkat pengembalian yang cukup memadai sesuai dengan hasil analisa kelayakan investasi daerah.

4. Kebijakan Pembagian dan Pemanfaatan Dana Otsus

1. Dana otonomi khusus Papua dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota secara berkeadilan dengan memperhatikan daerah-daerah tertinggal, terbelakang, terpencil dan tertentu;
2. Pembagian dana otsus dengan proporsi yang adil antara provinsi dan kabupaten/kota setelah pembagian dana urusan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota;
3. Dana Urusan Bersama (DUB) dipergunakan untuk membiayai program-program strategis lintas kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kepentingan bersama dan pencapaian prioritas daerah secara umum;
4. Dana otsus bagian provinsi dialokasikan pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur, Operasional Kelmbagaan MRP, Lembaga Keagamaan dan kegiatan monitoring evaluasi penyelenggaraan otsus;
5. Dana otsus bagian kabupaten/kota dialokasikan pada bidang Kesehatan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua dan Monitoring evaluasi penyelenggaraan otsus di tingkat kabupaten;
6. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus terutama diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur; (transportasi, air bersih, energi listrik, telekomunikasi dan infrastruktur bidang lainnya)
7. Sejumlah tertentu dari dana tambahan dalam rangka otsus dialokasikan kepada kabupaten/kota terutama yang rendah akses melalui bantuan keuangan

DAFTAR ISI

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III. 1
3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013-2017	III.2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III.2
3.1.2. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua.....	III. 14
3.1.3. Neraca Daerah	III. 17
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III.27
3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah	III.30
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III.35
3.3. KERANGKA PENDANAAN	III.37
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III.37
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III.43
3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	III.47
 DAFTAR ISI.....	 50
DAFTAR TABEL.....	51
DAFTAR GAMBAR.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta)	III.5
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.7
Tabel 3.3 Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (Rp juta)	III.10
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.11
Tabel 3.5 Perkembangan Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta)	III.13
Tabel 3.6. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2013-2017	III.16
Tabel 3.7. Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.19
Tabel 3.8. Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua	III.26
Tabel 3.9. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.30
Tabel 3.10. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2013-2017	III.32
Tabel 3.11. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.34
Tabel 3.12. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.35
Tabel 3.13. Defisit Riil APBD Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.36
Tabel 3.14. Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.36
Tabel 3.15. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	III.41
Tabel 3.16. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Provinsi Papua Tahun 2018-2023	III.43
Tabel 3.17. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Papua Tahun 2018-2023	III.44
Tabel 3.18. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023	III.45
Tabel 3.19. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	III.46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Garfik Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.3
Gambar 3.2 Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2013-2017	III.6
Gambar 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.8
Gambar 3.4 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.11
Gambar 3.5 Penerimaan Dana Otsus Periode 2013-2017	III.14
Gambar 3.6. Skema Sumber Dana Dan Pembagian Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.15